



<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>PBNU Ingin Perpres Fokus Pendidikan Karakter</b></p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">● WAHYU SURYANA</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">JAKARTA -- Pihak PBNU yang sebelumnya menolak kebijakan sekolah lima hari mengharap-kan perpres nantinya lebih fokus ke penguatan karakter. PBNU akan tetap menolak jika Presiden Joko Widodo menguatkan kebijakan lima hari sekolah hingga sore hari.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">"Jika menyimak pernyataan (Rais Aam PBNU) KH Ma'ruf Amin dan rilis Staf Kepresidenan, Presiden fokus pada penguatan karakter, jadi kami mendorong agar perpres fokus pada pendidikan penguatan karakter," kata Ketua PBNU M Sulton Fatoni saat dihubungi <i>Republika</i>, kemarin.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Untuk formulanya seperti apa, ia menuturkan, PBNU tentu akan tetap mendorong agar kebijakan yang ada tidak sampai membuat sekolah formal berjalan hingga sore hari. Namun, Sulton mengaku sepakat saja untuk aspek penguatan karakter sesuai arahan Presiden Joko Widodo.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">PBNU berpendapat, lanjut Sulton, sekolah formal sebaiknya berjalan sampai sekitar pukul satu siang sehingga waktu seterusnya bisa diisi pendidikan lain. Sulton mengungkapkan, PBNU mendorong pukul satu sampai menjelang magrib fokus untuk jam-jam pendidikan keagamaan.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Terkait Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, ia menegaskan PBNU telah memutuskan menolak kebijakan lima hari sekolah. Sulton menekankan, hal itu menjadi prinsip PBNU walau nanti dari per-mendikbud itu dinaikkan menjadi perpres. "Itu (per-pres) lebih pada penguatan cakupan dan daya paksa atas satu aturan hierarki suatu negara," kata Sulton.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Sedangkan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Mu-hammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Jo-ko Widodo menguatkan kebijakan sekolah lima hari sepekan. "Berharap agar Presiden memberikan penguatan, melakukan <i>back up</i>, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya.</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Dia mengatakan, jika ada wacana atau rencana menaikkan permendikbud soal sekolah lima hari menjadi perpres, seyogianya untuk menyempurna-kan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud Muhadjir Effendy. Sebaliknya perpres tidak malah mengaburkan, memperlemah, dan mem-batalkan itu.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Dia mengatakan, pada dasarnya kebijakan ter-sebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan. "Jika dirujuk pada Per-mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang di-jadikan pijakan bahwa apa yang dilakukan Men-dikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Pre-siden," kata dia.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Muhammadiyah, kata dia, mendukung sepe-nuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus menda-ukungnya dalam menjalankan tugas sampai berhasil. Menurut dia, Mendikbud Muhadjir Effendy dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas sehingga dia berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Haedar meyakini, Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam melaksana-kan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendid-ikan karakter. Kebijakan pendidikan di Indonesia, kata dia, perlu lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. ■ ed: fitriyan zamzami</p>				
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">ila</td> <td style="width: 50px;">Berita</td> <td style="width: 50px;">Sifat</td> <td style="width: 50px;">Tindak Lanjut</td> </tr> </table>	ila	Berita	Sifat	Tindak Lanjut	
ila	Berita	Sifat	Tindak Lanjut		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005